

BAB I

KASUS POSISI

Dirga Mahesa merupakan seorang *Public Figure* yang juga menjabat sebagai pimpinan sebuah lembaga bantuan hukum serta dikenal aktif dalam kegiatan advokasi serta pembelaan terhadap hak asasi manusia. Dirga kerap memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan dari rakyat kecil. Pada awal bulan Mei 2025, muncul adanya rencana untuk diadakannya aksi masa yang akan diselenggarakan oleh sejumlah organisasi dari masyarakat sipil yang ada di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Aksi tersebut direncanakan berlangsung damai dan juga terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menanggapi rencana tersebut, Dirga Mahesa menyatakan dukungannya terhadap gerakan masyarakat sipil dan menyerukan pentingnya solidaritas publik dalam menyuarakan aspirasi. Beberapa hari sebelum aksi berlangsung, Dirga mengunggah sebuah poster digital ajakan anak-anak untuk ikut aksi massa di akun media sosial pribadinya yaitu Instagram. Poster tersebut menampilkan tulisan “JANGAN TAKUT MELAWAN” yang berlatar warna merah hitam dan merah, serta mencantumkan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan dari aksi masa tersebut. Dalam keterangan unggahannya, Dirga menulis kalimat “Polisi butut, jangan takut. Mari bersuara! Kita lawan bareng. Anak-anak dan wanita akan aman. Jangan biarkan ketakutan membungkam kita. #JanganTakut #KitaLawanBareng #SolidaritasRakyat.”

Unggahan tersebut juga diketahui merupakan hasil kolaborasi antara Dirga dengan sejumlah aktivis dan akun organisasi masyarakat sipil lainnya, yang turut menyebarluaskan poster dan pesan serupa melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Polisi kemudian menilai bahwa tindakan Dirga Mahesa berkolaborasi dengan beberapa pihak dalam menyebarkan ajakan agar masyarakat “tidak takut” serta “melawan bersama” terhadap kebijakan pemerintah.

Poster yang diunggah oleh Dirga Mahesa kemudian menjadi viral dan tersebar luas di berbagai *platform* media sosial. Pada unggahan tersebut, tercantum kalimat yang menyatakan bahwa “anak-anak yang hadir akan tetap aman” yang selanjutnya dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk dari jaminan sekaligus ajakan langsung kepada anak-anak untuk turut serta dalam kegiatan demonstrasi. Pada hari pelaksanaan aksi, ribuan masa dari berbagai lapisan masyarakat hadir di beberapa titik strategis yang ada di Jakarta. Masa yang hadir terdiri dari mahasiswa, buruh, aktivis, dan masyarakat umum. Di antara kerumunan masa tersebut juga ditemukan anak-anak yang ikut hadir, baik bersama orang tua maupun dengan teman sebayanya, bahkan ada beberapa di antaranya masih mengenakan seragam sekolah. Kehadiran dari anak-anak inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh aparat kepolisian untuk bisa mengambil kesimpulan bahwa Dirga Mahesa telah melibatkan anak di dalam kegiatan politik dan aksi masa.

Dua hari setelah aksi berlangsung, tepatnya pada Senin malam, 12 Mei 2025, sekitar pukul 22.45 WIB, aparat kepolisian mendatangi kediaman dari Dirga Mahesa di Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan. Proses penangkapan dilakukan oleh puluhan anggota kepolisian, baik yang berpakaian sipil maupun

berseragam resmi, dengan menggunakan sejumlah kendaraan operasional. Berdasarkan keterangan dari keluarga, penangkapan dilakukan secara cepat dan menimbulkan kepanikan di lingkungan sekitar kediaman mereka. Aparat disebut tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan secara rinci, jelas dan tidak disertai kehadiran perangkat desa atau kelurahan. Selain itu, keluarga juga menyatakan bahwa aparat kepolisian yang melakukan penangkapan tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai alasan hukum dari penangkapan tersebut. Setelah diamankan, Dirga Mahesa langsung dibawa ke kantor polisi dan pihak keluarga tidak mendapatkan surat resmi apapun dari pihak kepolisian setelah kejadian tersebut.

Kasus Dirga Mahesa menimbulkan persoalan hukum utama, yakni terkait dugaan pelibatan anak dalam aksi masa serta provokasi melalui penyebaran poster digital di media sosial.